



**SINERGITAS TNI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM
KEBIJAKAN DERADIKALISASI DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

Oleh

**Wibisono Poespitohadi^{1*}, Wahyu Wiyani², Singgih Pambudi Arinto³, Titot Edy Suroso⁴,
Priyo Dari Mulyo⁵, Lian Agustina⁶**
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Merdeka Malang
Email : wibisonolp2m@gmail.com

Abstract

The rise of radicalism means that the situation and cases and issues trigger horizontal and vertical conflicts so that they become a threat to the country's defense. This study focuses on the threat of radicalism in East Java Province, one of the provinces with a relatively high level of radicalism. The implementation of the deradicalization program carried out by the TNI and Polri and other elements is currently only limited to the recipient level, and is impossible to implement at the frontline unit level, such as at the Koramil, Babinsa or Babinkamtibmas Police Station levels. The purpose of this study is to analyze the synergy between the TNI and related stakeholders in deradicalization in the East Java province. The research was conducted using qualitative methods and data collection was carried out through interviews and document studies. The results of the study show that the synergy between the TNI and deradicalization actors in East Java Province is generally successful but not optimal. The conclusion of the study is that the communication perspective in disseminating information and planning anti-radicalism actions has not been optimal; Coordination of anti-radicalization and deradicalization programs was not carried out optimally. and BNPT synergy that has not yet applied to other agencies such as the TNI, Polri, religious leaders and others. The study aims to create a roadmap for understanding and harmony in combating radicalism among relevant stakeholders and provide budgetary support and add personnel to combat the threat of radicalism.

Keywords : TNI Synergy, Policy, Deradicalization

PENDAHULUAN

Ancaman radikalisme merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Radikalisme menjadi pemicu serangan teroris dan tumbuh subur di lingkungan sosial yang rapuh, terutama dalam situasi politik yang memanas dan kondisi masyarakat yang terpengaruh pandemi Covid-19. Isu-isu konflik, perpecahan, persaingan yang tidak sehat, fitnah, dan hasutan terus berkembang dan berkontribusi pada meningkatnya radikalisme. Media informasi dan komunikasi juga berperan dalam menyebarkan paham radikal. Generasi milenial menjadi salah satu kelompok yang terpapar radikalisme dengan tingkat yang mencemaskan. Provinsi Jawa Timur khususnya merupakan salah satu daerah dengan tingkat radikalisme yang tinggi.

Pelaksanaan program pemberantasan terorisme di Indonesia saat ini masih terpusat pada tingkat pengambil keputusan di markas besar seperti Kemenkopolkam dan BNPT, sehingga implementasinya di tingkat satuan seperti Koramil dan Polsek masih terbatas. Program deradikalisasi menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan terorisme dan menjadi bagian dari struktur organisasi BNPT. Namun, sinergi dalam pelaksanaan program deradikalisasi antara berbagai pemangku kepentingan terkait masih belum optimal. TNI telah beberapa kali melakukan latihan kewaspadaan bersama kepolisian pada tahun 2005, 2007, 2014 hingga awal tahun 2016 pasca bom dan melakukan latihan pengintaian bahu membahu dengan kepolisian dalam beberapa konteks operasional di lapangan untuk menekan terorisme di Poso.



Tragedi di Sarinah, Jakarta (Prasetyo, 2006: hal. 45).

Sinergi antara Polri, TNI, BIN, dan kementerian/lembaga terkait dalam pemberantasan radikalisme telah terjalin dengan baik melalui kegiatan terintegrasi dan rapat koordinasi. Upaya deradikalisasi dilakukan melalui kolaborasi dengan pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, mantan narapidana, dan pihak-pihak yang berpandangan radikal, serta koordinasi pengawasan dan penyidikan terhadap kelompok radikal. TNI juga terlibat dalam menangani kegiatan anarkis di demonstrasi bersama polisi. Meskipun demikian, sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi masih perlu ditingkatkan dengan klarifikasi koordinasi, komunikasi, dan petunjuk SOP yang lebih jelas. Selain masalah kualitas dan kuantitas SDM aparatur TNI-Polri dalam program deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme, konteks geografis juga menjadi kendala tersendiri bagi efektifitas dan implementasi program tersebut (Prasetyo, 2006:hal. 50).

Kodam V/BRW aktif menjalin sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan bangsa. Sinergi ini menjadi model dalam melawan radikalisme dengan menggabungkan potensi perguruan tinggi, pemerintah, pengusaha, media sosial, dan masyarakat dalam program pemerintah. Terlebih lagi, intoleransi dan kekerasan beragama dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghambat sinergitas TNI dengan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sinergitas TNI dengan aktor-aktor terkait dalam kebijakan deradikalisasi di Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah, yang dipelajari berdasarkan faks

objektivitas yang terjadi pada saat menggambarkan keadaan objek yang diteliti atau semacamnya. Metode kualitatif Sugiyono (2012) adalah metode yang didasarkan pada obyektivitas dimana peneliti menjadi instrumen kunci penelitian itu, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, bersifat induktif dalam analisis data dan menafsirkan makna dalam temuan penelitian yang bersifat generalisasi. Kajian ini dilakukan untuk tujuan penelitian guna memperoleh gambaran umum Sinergitas TNI dengan pemangku kepentingan terkait dalam menanggulangi aksi radikalisme.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tiga komponen, yaitu ringkasan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjumlahan data adalah proses pemilihan, penjajaran, penyederhanaan dan pemadatan sumber data yang terdapat dalam catatan lapangan. Informasi lapangan berupa wawancara atau rangkuman, serta data sekunder yang ditranskrip menjadi laporan, yang kemudian direduksi dan dipilih tema-tema yang muncul. Penyajian informasi adalah seperangkat struktur informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian. Membuat kesimpulan adalah proses pengorganisasian informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Sinergi

Teori sinergi dijelaskan oleh Stoner dan Freeman (1996). Dari perspektif organisasi, sinergi berarti kerja sama dan bagian-bagian terpisah yang saling berhubungan dari suatu organisasi lebih produktif daripada saat bekerja sendiri. Unsur-unsur yang mendukung sinergi adalah sebagai berikut; Ada tujuan; Berorientasi pada hasil umum; Hasil umum lebih besar dari jumlah hasil individu; Pilihan ketiga adalah proses pengembangan.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergi adalah interaksi, koordinasi, dan kerja sama antar pemangku



kepentingan terkait, khususnya dalam rangka pemberantasan radikalisme. Teori ini digunakan untuk menganalisis sinergi dan sinergitas yang diharapkan antara TNI, dalam hal ini Kodam V/Brawijaya, dan pemangku kepentingan terkait.

Teori Kebijakan.

Pemerintah menggunakan kebijakan publik untuk memecahkan masalah pemerintah atau daerah. Padahal, politik telah membantu banyak birokrat dan politisi untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan publik juga merupakan intervensi pemerintah untuk kepentingan kelompok atau orang yang berada pada posisi yang lebih lemah dalam masyarakat. Menurut Lemieux dalam (Solichin Abdul Wahab 2015:15) kebijakan publik ialah:

“Kebijakan publik adalah suatu Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.”

Kebijakan merupakan sesuatu hal yang berfungsi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan melihat berbagai persoalan yang ada, yang akan menjadi program dari produk kebijakan, namun suatu program kebijakan yang sudah diimplementasikan harus di kaji dan di nalisis kembali sebagai bahan evaluasi kedepanya, dengan memahami analisis kebijakan sebagai suatu dari proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih baik. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi dengan menunjukkan adanya masalah dari kebijakan. Adapun kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan deradikalisasi yang dipadukan dengan

sinergitas meliputi aspek komunikasi, aspek koordinasi dan aspek Kerjasama.

Teori radikalisme dan deradikalisasi

Radikalisme, menurut Cross (2013), adalah ekspresi dalam gerakan sosial dan politik yang mengacu pada proses, praktik, atau rangkaian keyakinan dari negara non-radikal ke negara radikal. Radikalisme sering dikaitkan dengan berbagai taktik dan strategi yang berada di luar proses kerja politik atau agama yang dapat diterima bahkan mengarah pada ilegalitas.

Radikalisme juga merepresentasikan sisi ekstrem dari distribusi (kurva) aktivitas politik yang dapat diterima, dan radikalisme dapat mencakup tindakan kekerasan berdasarkan keyakinan. Pengertian ini menghendaki perubahan yang tuah dalam keadaan atau dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sikap ekstrem ini muncul di tengah periode yang menunjukkan kemiskinan, ketimpangan atau ketidakadilan sosial (Zuly Qodir, 2014, hal. 117).

Zahratul Mahmudati menjelaskan bahwa radikalisme adalah suatu gagasan atau sikap yang dicirikan oleh empat hal yang juga menjadi cirinya, yaitu (2014, 30):

- a. Pertama: tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.
- b. Kedua, kefanatikan, yaitu merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain.
- c. Ketiga, eksklusivitas, yaitu sikap tertutup dan berusaha berbeda dari kebiasaan orang banyak.
- d. Keempat, sikap revolusioner, yaitu kecenderungan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pemahaman dan perkembangan tersebut, Agus SB menyatakan dalam Ikhwanul Kiram Mashuri (2014) bahwa upaya untuk mengelola perkembangan dan penyebaran gerakan radikal di masyarakat harus dilakukan secara kolektif, berdasarkan kesadaran dan partisipasi penuh dari elemen masyarakat. Ada dua strategi yang bisa digunakan; melawan radikalisme dan



deradikalisasi. Tindakan melawan radikalisme bersifat preventif dan menyasar seluruh lapisan masyarakat.

Radikalisme dilawan dengan mengkampanyekan kepada seluruh elemen masyarakat untuk membangkitkan kesadaran atau pemahaman bahwa radikalisme dalam bentuk terorisme adalah bentuk kekerasan. Tidak ada kaitannya dengan ajaran agama, harus diperangi bersama (hal.15). Bersamaan dengan itu, ditetapkan pula bahwa deradikalisasi adalah strategi untuk mengatasi masalah radikalisme teroris, yaitu pemulihan (koreksi atau perbaikan) bagi para pelaku dan pihak lain dari gerakan ini. Para teroris ini sering mengindoktrinasi atau menyaksikan ideologisasi gerakan radikalisme. Proses ideologis membuat mereka menderita "radikalisme" (hlm. 15-15). Deradikalisasi adalah upaya untuk meningkatkan atau mengurangi radikalisasi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa deradikalisasi adalah upaya mereduksi dan menghilangkan paham radikal. teori ini digunakan untuk mendukung pernyataan tentang akar radikalisme dan upaya memerangi radikalisasi dan pemberantasan.

Sinergitas TNI dengan Pemangku kepentingan Terkait Dalam Mengurangi Radikalisasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur

Radikalisme di Indonesia saat ini telah menjadi masalah serius yang dapat menyerang siapa saja. Gerakan radikalisme ini tidak hanya menyasar kalangan tertentu dan kelompok usia tertentu, meski beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi muda adalah kelompok terbesar yang paling mudah disasar.

Adanya gerakan radikal memerlukan konsekuensi logis dari pemerintah melalui pemangku kepentingan terkait untuk bekerja secara sinergis. TNI dan pemangku kepengingans terkait juga harus menunjukkan sinergi tersebut, sehingga dapat saling melengkapi dan membantu dalam melawan radikalisme, mengingat radikalisme

mempengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi . untuk radikalisme berbasis agama.

Jawa Timur perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki indeks potensi radikal yang relatif tinggi dan juga mempromosikan sejumlah besar teroris di Indonesia. Tingkat risiko terorisme di lima provinsi ini juga umumnya tinggi. Meskipun Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah pengiriman teoretis, Jawa Timur dianggap sebagai daerah yang relatif aman untuk aksi teroris sejak lima tahun lalu. Situasi berubah ketika pada 13 Mei 2018 terjadi serangan bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, yakni gereja Santa Maria Tak Bercela, gereja Kristen Indonesia, dan gereja Pantekosta. Sedikitnya 11 orang tewas dan 1 luka-luka dalam operasi Dita Uprianto dan keluarganya 5. Hanya sehari setelah serangan bunuh diri terhadap tiga gereja di Surabaya, publik kembali dikejutkan dengan akibatnya. Polrestabes Surabaya menjadi target serangan bunuh diri. Ledakan tersebut menewaskan pelaku yaitu keluarga Dr Murtiono dan 3 anaknya, serta melukai 10 orang polisi dan masyarakat. Malam itu terjadi aksi bom bunuh diri di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo yang menewaskan 3 pelaku. Pelaku bom bunuh diri JAD (Jamaah Ansyori Daulah), anggota jaringan ISIS, di Surabaya menarik perhatian dunia. Kasus ini merupakan pelaku bom bunuh diri pertama di dunia yang pelakunya mengajak keluarganya untuk ikut serta dalam aksi teror tersebut.

Informasi lain terkait radikalisme di Jawa Timur, Divres Mabes Polri 88 menangkap 392 teoritis pada tahun 2021, di mana 35 orang ditangkap di Jawa Timur. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara provinsi di Indonesia. Menurut Divre 88 Polri, mereka terlibat dalam 26 kasus kejahatan ekstrem dan terorisme berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Sebelumnya, Direktur Riset Setara Institute Halili mengungkapkan sebanyak 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar radikalisme dan dua di antaranya berlokasi di Jawa Timur.



Melawan Radikalisme, artinya membatasi upaya proaktif memberantas ideologi radikal sebagai masalah dan upaya mengambil langkah-langkah yang menimbulkan efek jera yang membuat calon aktor tidak mau terlibat atau mendukung dan memperkuat radikalisme. dan untuk menciptakan lembaga yang efektif yang memfasilitasi kegiatan ini. Untuk memenangkannya diperlukan partisipasi yang terintegrasi dari semua institusi termasuk TNI, BNPT dan institusi lainnya.

Kegiatan gerakan radikalisme pada hakekatnya merupakan ancaman non-militer yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan radikal berupa kekerasan, teror dan perang ideologi radikal. Meskipun banyak pendapat yang menyatakan bahwa radikalisme dapat berasal dari agama manapun di dunia, namun radikalisme juga muncul sebagai akibat dari ketidakadilan sosial dan kebencian/balas dendam terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Hal ini terlihat dari fenomena global saat ini yang masih diwarnai dengan adanya gerakan radikal ISIS, kekerasan etnis, kerusuhan sosial dan berbagai serangan teroris yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa konsep radikalisme telah menjadi wabah di Indonesia yang tidak hanya merasuk ke dalam kelompok radikal, tetapi juga merasuk ke dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Lebih jauh lagi, penghasutan, penghasutan dan tindakan kekerasan, terutama melalui media, telah merusak kehidupan dan menjadi destruktif di era kebebasan pers dan kelonggarannya. bagi polisi untuk bekerja sama dengan instansi/instansi lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman radikalisme diperlukan hubungan kerja sama dan upaya bersama antar lembaga terkait.

Sinergi antara TNI dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan misi inti TNI dan dalam rangka Operasi dan Permusuhan Militer (OMSP), seperti penanggulangan aksi terorisme yang berbasis pada adanya gerakan

radikalisme. yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, sangat penting untuk menciptakan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait seperti BNPT, Polri, FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme), Kementerian dan Badan Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Bakesbangpol. tingkat, misalnya di provinsi Jawa Timur.

Dalam kajian sebelumnya yang dilakukan di Balitbang Provinsi Jawa Timur tahun 2021, ditemukan bahwa di Provinsi Jawa Timur sendiri, perkembangan fenomena intoleransi radikalisme dalam kehidupan beragama ditunjukkan dengan serangan dari berbagai kelompok. dalam keyakinan. Hal ini dikarenakan sebagian kelompok terutama generasi muda masih memiliki pemahaman agama yang lemah karena menerima informasi keagamaan dari sumber yang kurang bertanggung jawab seperti internet (Bakesbangpol, 2019).

Di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sinergi antara TNI dengan pemangku kepentingan terkait antiradikalisasi belum berjalan maksimal mengingat radikalisme yang masih berkembang.

Untuk melihat sinergi antara TNI dan komponen terkait lainnya dalam penanggulangan radikalisme, penulis menggunakan teori sinergi yang dijelaskan oleh Stoner dan Freeman (1996). Berdasarkan teori sinergi di atas, terdapat 3 (tiga) parameter yang dapat dijadikan pisau analisis dalam kajian sinergi antar instansi, yaitu aspek komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, **kondisi sinergitas** pemberantasan radikalisme antara TNI dan komponen lain di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Aspek komunikasi dalam penyebaran informasi dan perencanaan penanggulangan radikalisme. Aspek komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam konsep sinergi, karena tanpa komunikasi sangat sulit bagi



lembaga dan instansi untuk besinergitas. Stoner mengatakan bahwa komunikasi adalah proses memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada orang lain melalui transmisi pesan. Dapat dilihat dari pengertian bahwa tujuan komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi dan mencapai saling pengertian antar instansi atau lembaga. Aspek komunikasi ini merupakan kunci terpenting untuk meningkatkan sinergi.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) adalah organisasi yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk memerangi radikalisme dan terorisme, yang memiliki berbagai fasilitas, lembaga, dan lembaga untuk pencegahan dan implementasi radikalisme dan terorisme. Dalam menjalankan tugas dan tugasnya, BNPT tidak dapat berfungsi secara maksimal jika tidak didukung oleh beberapa instansi terkait yang memiliki kapasitas misi yang sama dengan TNI dan Polri, FKPT dkk. Kesadaran akan perlunya sinergi antar lembaga untuk mengalahkan radikalisme telah menjadi kesadaran umum sesuai dengan rencana aksi sinergis yang digagas oleh 6 kementerian dan lembaga negara untuk mencegah berkembangnya radikalisme (nasional.sindo.news, 2022).

Komunikasi adalah salah satu dimensi terpenting untuk mencapai sinergi, berdasarkan adanya tujuan yang diarahkan pada hasil bersama, yang lebih besar dari jumlah setiap hasil, dan sebagai bagian dari proses pembangunan. pilihan ketiga. Meskipun kesadaran akan pentingnya kohesi dalam mengalahkan radikalisme telah tumbuh di seluruh institusi, namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya diterapkan di lapangan dalam mengalahkan radikalisme selama ini.

Namun, karena arahan dari masing-masing lembaga, serta TNI, BNPT, pemda dan kepolisian, mereka beroperasi secara terpisah menurut sektor. Namun komunikasi tersebut tidak optimal karena

tidak menjamin penyebaran informasi secara utuh dan tidak dapat meningkatkan pemahaman yang sama tentang indikasi, akar permasalahan dan konsep penanggulangan radikalisme.

Komunikasi biasanya formal dan santai ketika aksi radikalisme nyata terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ternyata, komunikasi ini masih terbatas pada level preventif, sedangkan komunikasi preventif belum bisa dilakukan secara intensif.

- b. Aspek koordinasi dalam pelaksanaan program. Koordinasi adalah kunci sukses dalam setiap operasi yang melibatkan lebih dari satu instansi atau lembaga.

Dalam teori Sinergi, Stoner (1996) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses menggabungkan tujuan dan fungsi unit organisasi yang terpisah (departemen atau bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Koordinasi output menciptakan harmoni dan keselarasan tindakan. yang secara bersama-sama diterapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sedemikian rupa sehingga beban kerja setiap bagian konsisten dan proporsional. Sebagai salah satu fungsi dari rantai komando, koordinasi merupakan fungsi untuk menyelaraskan semua fungsi. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan lebih dari satu pihak pasti membutuhkan fungsi koordinasi.

Selain itu, koordinasi juga penting ketika menghadapi suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak normatif, acak atau tidak terencana. Koordinasi antara komando daerah dan pemangku kepentingan umumnya dilakukan. Namun, koordinasi yang dilakukan tidak dapat menyelaraskan kegiatan dan agenda masing-masing lembaga. Koordinasi lebih banyak menyangkut hal-hal seremonial seperti pengumuman suatu peristiwa atau perayaan, tetapi tidak diikuti dengan koordinasi yang permanen atau melembaga. Tidak ada kegiatan koordinasi yang telah diprogramkan untuk kegiatan-



kegiatan utama. Koordinasi dilakukan hanya ketika aksi radikalisme yang kuat terjadi di provinsi Jawa Timur, yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang luas.

Hal ini menyebabkan konsep pemecahan masalah integrasi tidak dapat dibuat. Padahal aspek koordinasi ini penting untuk mengatasi akar penyebab maraknya radikalisme, penyebaran paham radikal melalui internet, dorongan dakwah untuk menciptakan intoleransi antar umat beragama, kekerasan satu kelompok agama, kelompok agama, agama lain, seperti pembubaran kegiatan keagamaan, penolakan pembangunan tempat ibadah, dll.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Kodam V/Brawijaya dengan pemangku kepentingan terkait belum optimal, terlihat jelas agenda dan kegiatan para pemangku kepentingan dalam memerangi radikalisme tidak harmonis.

- c. Aspek kerjasama dalam pelaksanaan program anti radikalisasi dan deradikalisasi. Bentuk sinergi yang sesungguhnya adalah adanya sinergitas yang harmonis antara unsur-unsur yang terlibat Stoner dan Freeman mengatakan bahwa tingkat sinergitas yang paling baik adalah sinergis yaitu sinergitas yang tinggi, saling percaya dan terintegrasi sehingga output lebih besar dari jumlah. dari mereka. hasil untuk masing-masing pihak tercapai. Dogma ini menunjukkan bahwa sejauh mana sinergitas TNI dengan pemangku kepentingan dapat dilihat dari hasil tumbuh kembang penyebaran paham radikalisme di Jawa Timur.

Serta Yusuf Ali dalam bukunya Penelitian Bela Negara dan Kontra Radikalisme (2021, hlm. 35) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia memang menjalankan program pemberantasan dan kontra radikalisme, namun dengan bantuan lembaga lain, terutama lembaga pendidikan, yang juga

menerapkan anti radikalisasi secara sinergis, tentunya memaksimalkan hasil yang dicapai.

Dalam sinergitas yang terjalin bersama, Kodam V/BRW dan pasukan Korem bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BNPT, antara lain melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya Bakesbangpol, agar tokoh agama dapat secara intensif melaksanakan:

- a. Dialog radikalisme dengan universitas dan agama.
- b. sinergi dengan BNPT dan Kemenkumham untuk pendaftaran narapidana di Lapas se-Jawa Timur;
- c. mendata mantan narapidana di 16 kabupaten/kota administratif wilayah Jawa Timur dan mendata pengunjung narapidana bekerja sama dengan Lapas Kemenkumham;
- d. mendata pimpinan dan anggota organisasi yang berkaitan dengan gerakan radikal;
- e. mengumpulkan dan memantau informasi tentang pesantren dan masjid tempat mantan narapidana bersekolah atau terpapar pandangan radikal;
- f. melaksanakan deteksi dini dan pencegahan dini bersama mitra Karib (Toga, Todat dan Tomas),
- g. mengaktifkan komunikasi sosial dan membentuk jejaring di wilayah;
- h. melaksanakan rapat darurat, laporan mendesak, alat intelijen dan pengawasan wilayah;
- i. meningkatkan sosialisasi anti radikalisme di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda dalam kaitannya dengan pemahaman visi kewarganegaraan dan perlindungan negara,
- j. pemberdayaan Babinsa untuk mensosialisasikan wajib lapor dan kesadaran ekologis.
- k. promosi radikalisme dan intoleransi melalui spanduk yang diterbitkan di semua unit dan media online; dan
- l. sinergi dengan pengelola media dan organisasi jurnalis untuk membatasi konten radikal dan anti toleransi;



- m. memantau gerakan radikal di setiap wilayah Kodim;
- n. dukungan FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) melalui pengurus Babinsa, Danramil dan Dandim;
- o. ikut serta dalam pengawasan program pengelolaan visi radikal pemerintah provinsi;
- p. bersama BNPT dan instansi terkait melakukan upaya deradikalisasi dengan mengajak eks nabi seperti Ustad Ali Fauzi (Lamongan) dan Ustad Syahrul (Singosari Malang Regado) untuk ikut serta dalam radikalisme dan terorisme agar yang terdampak merasa diterima. dan mendorong orang untuk menjadi teroris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Ustad Ali Fauzi, mantan narapidana teroris, yang merupakan adik dari pelaku bom Bali I tahun 2002 (Ali Imron, Amroz dan Ali Gufron) di Lamongan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat kesimpulan bahwa berbagai kegiatan yang dibiayai oleh BNPT hilang dari jajaran Kodam dan Polda. Aparat Kodim setempat lebih memperhatikan masalah personal, namun secara kelembagaan masih kurang. Selain itu, wawancara dengan Hendra (anak Amroz, narapidana bom Bali 1), yang bekerja di perusahaan swasta dan umumnya menghidupi keluarganya, kurang mendapat perhatian dari pemangku kepentingan terkait.

Selain poin-poin yang disebutkan di atas, hasil wawancara dengan pimpinan Kesbangpol Jawa Timur mengungkapkan bahwa hasil penelitian Kesbangpol Jawa Timur menunjukkan bahwa radikalisme sudah bisa mengancam banyak generasi muda, terutama melalui internet. Semua fakta terkait kemungkinan aksi terorisme dan radikalisme menunjukkan bahwa potensi radikalisme di Jawa Timur masih tinggi, hal ini akibat sinergitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam radikalisme di Jawa Timur belum optimal.

Dari hasil penelitian, berdasarkan studi dokumenter dan wawancara serta

analisis “teori sinergi” Stoner dan Freeman serta “teori radikalisme” Cross, gambaran pertanyaan pokok yang ditemukan bersifat deskriptif:

- a. Tidak ada cara berpikir yang terpadu. dan model aksi dalam menghadapi radikalisme. Dari berbagai fakta yang dipaparkan dalam pembahasan pemberantasan radikalisme yang meliputi program anti radikalisasi dan deradikalisasi, masih terdapat permasalahan antara instansi Kodam V/Brw, Polda Jatim dan Polda Jatim. Pemprov Jatim, Koordinator BNPT, FKPT dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan data dan fakta yang terlihat, banyak upaya antiradikalisasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga tersebut masih bersifat sektoral dan terkesan ego sektoral. Hal ini juga disebabkan karena perencanaan yang kurang simultan, dimana masing-masing lembaga bertindak sesuai dengan agendanya masing-masing dan tidak ada kesatuan konsep untuk mengatasi radikalisme.

- b. Penanggulangan radikalisme tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam program kerja Kodam V/Brw, pemberantasan radikalisme masuk dalam program kerja yang akan dilaksanakan di bidang pembangunan komunikasi sosial (Binkomsos) dan pembangunan ketahanan daerah (Binwanwil). Namun, dukungan sumber daya yang meliputi personel, program yang efektif, dan dana yang tersedia tidak didukung secara memadai, sehingga program yang dilaksanakan tidak optimal baik dari segi jumlah sasaran yang ditargetkan maupun kualitas dari setiap sasaran. aktivitas

Demikian pula di kantor-kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana program anti radikalisasi dipimpin oleh kantor Bakesbangpol, yang dalam hal ini diarahkan oleh Direktur Program Radikalisisasi Departemen Kewaspadaan Nasional dan Direktur Pemerintah Pusat . sektor kesatuan. sumber daya yang



digunakan dalam program pencegahan atau anti-radikalisasi umumnya tidak mencukupi. Memerangi radikalisme merupakan salah satu bidang BNPT, dimana 6 (enam) orang koordinator BNPT di Provinsi Jawa Timur melakukan tugas ini setiap harinya, khususnya di Wilayah Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo dan Probolinggo. jumlah koordinator 6 orang ini sangat sulit karena jumlah kabupaten di Jatim pada tahun 2021 menjadi 38 kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa. Kurangnya dukungan yang memadai untuk pelaksanaan program anti-radikalisasi ini telah mempengaruhi upaya Synergy. Sumber daya manusia) kapasitas dan pengetahuan, tempat yang diperlukan dan dukungan anggaran.

- c. Masih adanya sikap ego sektoral bahwa sinergitas yang dibangun belum optimal. Perjuangan melawan radikalisme tidak akan berhasil jika ditangani secara sektor per sektor, karena banyak faktor penyebab radikalisme, mulai dari faktor ideologis, faktor ekonomi, faktor politik bahkan faktor problematika pribadi. diperlakukan dengan sikap ego sektoral-spesifik. Salah satu sikap ego sektoral tersebut dipicu oleh perasaan bahwa dirinyalah yang paling mumpuni untuk menangani masalah tersebut. Dalam jangka panjang, sikap ego sektoral ini berdampak besar pada sinergi antar pemangku kepentingan.

BNPT yang merupakan aktor kunci dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme terkadang tidak berlaku bagi pihak lain seperti TNI, Polri, tokoh agama, dll. Demikian pula, polisi terkadang melakukan berbagai kegiatan investigasi dan represif tanpa koordinasi yang memadai dengan aparat kewilayahan TNI.

Demikian pula tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah sebenarnya memiliki potensi besar jika ikut aktif dalam memerangi radikalisme.

PENUTUP

Kesimpulan

Sinergitas TNI dengan pemangku kepentingan terkait dalam kebijakan deradikalisasi di Provinsi Jawa Timur

- 1) Aspek komunikasi dalam mengambil dan merencanakan tindakan anti radikalisme. Karena masing-masing lembaga baik itu TNI, BNPT, Pemda maupun Polri masih berusaha bertindak independen sesuai dengan departemennya. Namun, komunikasi tersebut kurang optimal karena tidak menjamin penyebaran informasi secara utuh dan tidak dapat meningkatkan pemahaman yang sama terhadap indikasi, akar permasalahan dan konsep penanggulangan radikalisasi.
- 2) Aspek koordinasi dalam pelaksanaan program anti radikalisasi dan anti radikalisasi. Belum terlaksana secara maksimal, terlihat agenda dan kegiatan kelompok kepentingan antiradikalisasi tidak selaras.
- 3) Aspek kerjasama dalam pelaksanaan program anti radikalisasi dan anti radikalisasi. BNPT yang berperan penting dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme terkadang mengabaikan pihak lain seperti TNI, Polri, tokoh agama dan lain-lain. Selain itu, polisi terkadang melakukan berbagai tindakan penyidikan dan represif tanpa koordinasi yang memadai dengan satuan wilayah TNI.5.2 Usulan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta 2015.
- [2] Ali, Yusuf. (2021). Penelitian Bela Negara Dan Kontra-Radikalism.Jakarta: Universitas Pertahanan RI.
- [3] Asep Syamsul M. Romli. (2018). Jurnalistik Online. Bandung: Nuansa Cendekia,



- [4] Barry Buzan (1991). *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- [5] Bakesbang Pol.Provinsi Jawa Timur. (2019). *Penelitian Bakesbangpol Propinsi Jatim bekerja sama dengan Pusat kajian pengelolaan Negara dan Kewarganegaraan Unair (Center for Statecraft and Citizenship Studies)*. Surabaya.
- [6] Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. (2019). *Kajian Akademik Perkembangan Radikalisme dan Terorisme di Jawa Timur*. Surabaya.
- [7] Dep Faljuang Seskoad, (2022). *Naskah Departemen tentang Ketahanan Nasional*. Bandung: Seskoad
- [8] Emily R. (2011). *Collaboration: A Literature Review*.
- [9] Hotniar Siringoringo. (2005). *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [10] Miles, Huberman dan Saldana, (2014), *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- [11] Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- [12] Rahakundini. S. (2007) *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- [13] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [14] _____(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [15] _____(2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [16] Stoner, James A.F & Edward Freeman. (1996). *Manajemen jidid I*. Alih Bahasa Alexander Sindoro.PT. Prehallindo,Jakarta.
- [17] Warlim, (2020). *Materi Diskusi Panel SBS.Kejuangan dengan judul "Optimalisasi Nilai-nilai Kejuangan TNI guna meningkatkan peran dan fungsi TNI dalam mencapai visi Indonesia 2045"*. Bandung,
- [18] Zuly Qodir. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia/* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [19] *Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya* ,Hendro wicaksono BNPT,Jurnal Kriminologi Volume 2 Nomor 2 Desember 2018 Hal: 88
- [20] *Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Tahun 2007*, Hal 13.
- [21] *Undang Undang RI No. 24 Tahun 2007*, Hal 39.
- [22] *Undang Undang RI No. 3 Tahun 2002*, Hal 77.
- [23] Akmal, Ardiyansah, 2017. *Mencermati Dinamika Radikalisme, Ekstrimisme, dan Komunisme di Media Sosial*, lihat <https://www.kompasiana.com/akmalardiansyah/58773584707a61f30c3b580b/mencermati-dinamika-radikalisme-ekstrimisme-dan-komunisme-di-media-sosial>, diakses pada 22 September 2022.
- [24] M Prawiro, *Pengertian Radikalisme, Sejarah, Ciri-Ciri, Penyebab Radikalisme*, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-radikalisme.html>, diakses pada 5 September 2022.
- [25] Nur Jamal Shaid, *Stake holder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya*, <https://money.kompas.com/read/2022/03/20/212756726/stakeholder>, diakses pada 5 September 2022.
- [26] Vanya Karunia Mulia Putri, *Ketahanan Nasional: Pengertian dan Fungsinya*, 06 September 2022,<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/08/151456069/ketahanan-nasional-pengertian-dan-fungsinya> , diakses pada 5 September 2022.
- [27] Serafica Gischa, 2020. *Globalisasi dan perubahan perilaku masyarakat*, Lihat : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/24/130000469/>



-
- globalisasi-perubahan-perilaku-masyarakat. diakses pada 3 Agustus 2020
- [28] <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/141951069/latar-belakang-kesamaan-sejarah-dalam-pembentukan-asean>, diakses pada 18 September 2022.
- [29] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126120434-12-751396/polri-tangkap-392-terduga-teroris-pada-2021-jatim-sumut-terbanyak> diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 pkl 22.00 Wib
- [30] <https://www.suara.com/news/2019/06/01/192401/10-ptn-disebut-survei-terpapar-paham-radikalisme-berat?page=all> diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 22.30 wib
- [31] <http://repository.untag-sby.ac.id/1780/3/BAB%20II.pdf>
- [32] <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b31feb350abd/node/534/undang-undang-nomor-5-tahun-2018>, diakses pada 7 September 2022.
- [33] <https://blog.ub.ac.id/rizzalutfiyatulmufidah/2019/09/04/konsep-kerja-sama/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 20.00
- [34] <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html>
- [35] <https://www.wikiapbn.org/keuangan-negara/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 20.20 wib



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN